

**PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL, MORALITAS
INDIVIDU, *PERSONAL CULTURE* DAN KETAATAN
ATURAN AKUNTANSI TERHADAP KECURANGAN
AKUNTANSI
(Studi Empiris Pada OPD Kabupaten Magelang)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-1**



Disusun oleh:
Indah Nurmalasari
NIM. 16.0102.0149

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2020**

**PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL, MORALITAS
INDIVIDU, *PERSONAL CULTURE* DAN KETAATAN
ATURAN AKUNTANSI TERHADAP KECURANGAN
AKUNTANSI
(Studi Empiris Pada OPD Kabupaten Magelang)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Magelang**



Disusun oleh:
Indah Nurmalasari
NIM. 16.0102.0149

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2020**

**PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL, MORALITAS INDIVIDU, *PERSONAL CULTURE*
DAN KETAATAN ATURAN AKUNTANSI TERHADAP KECURANGAN AKUNTANSI
(Studi Empiris Pada OPD Kabupaten Magelang)**

Susunan Tim Penguji

Muji Mirnani, S.E., M.Si., Ak., CA.
Pembimbing I

Pembimbing II

Tim Penguji

Nur Laila Yuliani, S.E., M.Sc., Ak.

Ketua

Muji Mramani, S.E., M.Si., Ak., CA.

Sekretaris

Farida, S.E., M.Si., Ak., CA.

Anggota

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Sarjana S1

Tanggung

Dra. Marlina Kurnia, MM

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Nurmalasari

NIM : 16.0102.0149

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Dengan ini menyatakan skripsi yang saya susun dengan judul:

**PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL, MORALITAS INDIVIDU,
PERSONAL CULTURE DAN KETAATAN ATURAN AKUNTANSI
TERHADAP KECURANGAN AKUNTANSI
(Studi Empiris Pada OPD Kabupaten Magelang)**

adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari skripsi orang lain. Apabila dikemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar sarjananya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Magelang, 7 September 2020

Pembuat Pernyataan,



Indah Nurmalasari

NIM. 16.0102.0149

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

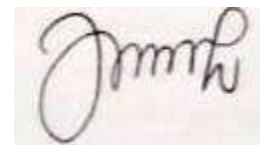
Nama : Indah Nurmalasari
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Magelang, 19 September 1998
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat Rumah : RT 03/07 Karang Kidul, Kel. Rejowinangun Selatan, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang
Alamat Email : Indahnurmalasari21@gmail.com
Pendidikan Formal :
Sekolah Dasar (2004-2010) : SD Negeri Rejowinangun Selatan 2
SMP (2010-2013) : SMP Negeri 8 Magelang
SMK (2013-2016) : SMA Negeri 4 Magelang
Perguruan Tinggi (2016-2020) : S1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang

Pengalaman Organisasi :

- Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HMA) Universitas Muhammadiyah Magelang Periode 2017-2018.

Magelang, 7 September 2020

Peneliti



Indah Nurmalasari
NIM. 16.0102.0149

MOTT

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.

(QS. Al-Insyirah 6-8)

Barang siapa yang menapaki suatu jalan dalam menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.

(HR Ibnu Majah dan Abu Dawud)

The best way to predict the future is to create it

(Abraham Lincoln)

KATA PENGANTAR

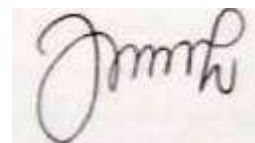
Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul **“PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL, MORALITAS INDIVIDU, PESONAL CULTURE DAN KETAATAN ATURAN AKUNTANSI TERHADAP KECURANGAN AKUNTANSI (Studi Empiris Pada OPD Kabupaten Magelang)”**. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Ibu Muji Mranani S.E., M.Si., Ak., CA selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Wawan Sadtyo Nugroho, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Ibu Nur Laila Yuliani, S.E., M.Sc., Ak, selaku dosen penguji 1 (satu) yang sudah banyak memberikan kritik dan saran dalam perbaikan skripsi saya.
4. Ibu Farida S.E., M.Si., Ak., CA, selaku dosen penguji 2 (dua) yang juga banyak membantu memberikan masukan dalam perbaikan skripsi.
5. Seluruh Dosen Pengajar yang telah memberikan bekal ilmu yang tak ternilai harganya dan telah membantu kelancaran selama menjalankan studi di Universitas Muhammadiyah Magelang.
6. Kedua orang tua saya tercinta yang selama ini selalu memberikan *support* berupa do'a, semangat, serta kasih sayang.
7. Sahabat dan teman-teman yang selalu berbagi semangat untuk menyelesaikan skripsi bersama-sama, serta seluruh pihak yang telah banyak membantu, dan mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi.

Magelang, 7 September 2020

Peneliti



Indah Nurmalasari
NIM. 16.0102.0149

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	iii
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kontribusi Penelitian.....	10
E. Sistematika Pembahasan	10
BAB II	13
TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS	13
A. Telaah Teori	13
1. Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>).....	13
2. Kecurangan Akuntansi	15
3. Pengendalian Internal	18
4. Moralitas Individu	22
5. <i>Personal Culture</i>	23
6. Ketaatan Aturan Akuntansi	25
B. Telaah Penelitian Sebelumnya	26
C. Perumusan Hipotesis	29
1. Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Kecurangan Akuntansi	29
2. Pengaruh Moralitas Individu Terhadap Kecurangan Akuntansi	30
3. Pengaruh <i>Personal Culture</i> Terhadap Kecurangan Akuntansi	32
4. Pengaruh Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecurangan Akuntansi	33
D. Model Penelitian	35
BAB III.....	36
METODA PENELITIAN.....	36
A. Populasi dan Sampel	36
B. Data Penelitian	37
1. Jenis dan Sumber Data	37
2. Teknik Pengumpulan Data	38
C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel	39
D. Alat Analisis Data	41
1. Statistik Deskriptif.....	41

2. Uji Kualitas Data	41
E. Pengujian Hipotesis.....	42
1. Analisis Regresi Linear Berganda	42
2. Uji Koefisien Determinasi (<i>Adjusted R²</i>)	43
3. Uji F (<i>goodness of fit test</i>)	43
4. Uji Statistik t (t-test)	44
BAB IV	46
HASIL DAN PEMBAHASAN	46
A. Statistik Deskriptif Data	46
B. Statistik Deskriptif Responden.....	46
C. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	48
D. Uji Kualitas Data.....	50
1. Pengujian Validitas.....	50
2. Pengujian Reliabilitas	52
E. Pengujian Hipotesis.....	53
1. Analisis Regresi Linear Berganda	53
2. Uji Koefisien Determinasi (<i>Adjusted R²</i>)	53
3. Uji F (<i>goodness of fit test</i>)	54
4. Uji Statistik t (t-test)	55
F. Pembahasan.....	58
1. Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Kecurangan Akuntansi	58
2. Pengaruh Moralitas Individu terhadap Kecurangan Akuntansi.....	60
3. Pengaruh <i>Personal Culture</i> terhadap Kecurangan Akuntansi.....	61
4. Pengaruh Ketaatan Aturan Akuntansi terhadap Kecurangan Akuntansi	63
BAB V.....	65
KESIMPULAN.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Keterbatasan Penelitian.....	65
C. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN.....	70

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Telaah Penelitian Sebelumnya	26
Tabel 3.1 Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel	39
Tabel 4.1 Sampel Penelitian dan Tingkat Pengembalian Kuesioner	46
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif Responden	47
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	48
Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas.....	50
Tabel 4.5 <i>Cross Loading</i>	51
Tabel 4.6 Hasil Uji Reliabilitas.....	52
Tabel 4.7 Koefisien Regresi.....	53
Tabel 4.8 Uji Koefisien Determinasi	54
Tabel 4.9 Uji F	54
Tabel 4.10 Uji t	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Penelitian	35
Gambar 3.1 Uji F	44
Gambar 3.2 Uji t Kriteria Positif.....	45
Gambar 3.3 Uji t Kriteria Negatif	45
Gambar 4.1 Nilai Uji F.....	55
Gambar 4.2 Nilai Uji t Pengendalian Internal terhadap Kecurangan Akuntansi ..	56
Gambar 4.3 Nilai Uji t Moralitas Individu terhadap Kecurangan Akuntansi	57
Gambar 4.4 Nilai Uji t <i>Personal Culture</i> terhadap Kecurangan Akuntansi	57
Gambar 4.5 Nilai Uji t Ketaatan Aturan Akuntansi terhadap Kecurangan Akuntansi	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Sampel Penelitian	70
Lampiran 2. Kuesioner Penelitian.....	71
Lampiran 3. Surat Ijin Penelitian	81
Lampiran 4. Bukti Penerimaan Kuesioner	83
Lampiran 5. Tabulasi Data Kuesioner (Data Mentah)	86
Lampiran 6. Tabulasi Data Kuesioner (Setelah Validasi).....	101
Lampiran 7. Statistik Deskriptif	116
Lampiran 8. Uji Validitas.....	117
Lampiran 9. Uji Reliabilitas	124
Lampiran 10. Uji Hipotesis	125

ABSTRAK

PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL, MORALITAS INDIVIDU, *PERSONAL CULTURE* DAN KETAATAN ATURAN AKUNTANSI TERHADAP KECURANGAN AKUNTANSI (Studi Empiris Pada OPD Kabupaten Magelang)

**Oleh :
Indah Nurmalasari**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris mengenai pengaruh pengendalian internal, moralitas individu, *personal culture* dan ketaatan aturan akuntansi terhadap kecurangan akuntansi pada OPD Kabupaten Magelang. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, sehingga sampel penelitian diperoleh sebanyak 100 responden yang merupakan pegawai bagian keuangan/akuntansi pada OPD di Kabupaten Magelang. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif dengan aplikasi IBM SPSS versi 20 yang meliputi uji statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, analisis regresi linear berganda, uji koefisien determinasi (*adjusted R²*), uji F (*goodness of fit test*), uji statistik t (*t-test*). Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa *personal culture* berpengaruh positif terhadap kecurangan akuntansi, sementara pengendalian internal, moralitas individu dan ketaatan aturan akuntansi tidak berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi.

Kata kunci : *Pengendalian Internal, Moralitas Individu, Personal Culture, Ketaatan Aturan Akuntansi, Kecurangan Akuntansi.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal ini berarti dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sebagai negara kesatuan berarti bahwa pemerintah pusat memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur seluruh daerah secara totalitas. Menurut (Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, n.d.), pemerintah daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesai (NKRI). Pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah beserta jajarannya dari suatu daerah otonom baik di level provinsi maupun kabupaten atau kota yang terdiri dari Gubernur, Bupati atau Walikota beserta perangkat daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintah daerah dimana salah satu aspek yang dikelola adalah aspek keuangan daerah.

Keuangan daerah menurut (Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, n.d.) merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk

kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa keuangan daerah tidak hanya berbentuk kas saja, namun juga dapat berupa non kas seperti aset tetap daerah dalam bentuk jembatan, gedung, jalan, bangunan bersejarah dan lain sebagainya. Aset daerah dalam bentuk kas akan dilaporkan dalam laporan keuangan daerah. Aset berbentuk non kas akan diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Pengelolaan keuangan daerah merupakan pengelolaan keuangan di pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan daerah (Pratolo et al., 2016). Di era reformasi seperti sekarang, dimana terjadi perubahan drastis dalam berbagai bidang termasuk sosial politik, masyarakat lebih menuntut pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melaksanakan *Good Corporate Governance* (GCG). Bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik atau masyarakat tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan yang transparan dan akuntabel sehingga dapat mewujudkan kepercayaan masyarakat.

Laporan keuangan selain sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan urusan pemerintahan juga merupakan hal yang rentan terhadap tindakan kecurangan akuntansi. Menurut Tuanakotta (2010), ACFE (*Association of Certified Fraud Examiner*) membagi kecurangan ke dalam tiga jenis yaitu kecurangan laporan keuangan, penyimpangan aset dan korupsi. Kecurangan laporan keuangan merupakan kecurangan dalam bentuk

salah saji material yang sengaja dilakukan untuk memanipulasi laporan keuangan. Penyimpangan aset merupakan kecurangan dalam bentuk penyalahgunaan aset suatu entitas. Korupsi merupakan bentuk kecurangan yang paling sulit dideteksi karena pelakunya cenderung bekerja sama satu sama lain untuk menikmati keuntungan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi merupakan bentuk penyelewengan maupun penyalahgunaan uang negara untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun secara kelompok. Bentuk korupsi di dalam pemerintahan dapat berupa penyalahgunaan wewenang, suap, penerimaan yang tidak sah maupun pemerasan secara ekonomi.

Upaya pemerintah meminimalisir kecurangan dalam pelaporan keuangan di instansi pemerintahan yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 yang membahas mengenai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berubah dari kas basis ke akrual basis. Kas basis digunakan untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang berarti pendapatan diakui pada saat kas diterima dari rekening kas umum negara atau daerah, sedangkan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum negara atau daerah. Sedangkan akrual basis pada neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan kas atau setara kas diterima atau dibayar. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dengan akrual basis dinilai akan menghasilkan laporan keuangan yang transparan karena mencatat kejadian /

peristiwa keuangan secara terperinci tanpa memperhatikan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Beralihnya kas basis ke akrual basis diharapkan memberikan laporan keuangan yang transparan serta terhindar dari potensi kecurangan dalam penyalahgunaan laporan keuangan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrual, n.d.)

Transparency International Indonesia (TII) telah merilis data *Corruption Perception Indeks* (CPI) Indonesia tahun 2019, yang berada pada skor 40. Penilaian CPI tersebut didasarkan pada skor 0 untuk sangat korup dan skor 100 untuk sangat bersih dari tindak korupsi. Dengan skor 40 tersebut Indonesia berada pada peringkat 85 dari 180 negara. Hal ini berarti telah mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Diketahui pada tahun 2016 dan 2017 skor CPI Indonesia stagnan dengan skor 37 dengan peringkat 82 di tahun 2017. Pada tahun 2018 skor CPI Indonesia naik menjadi 38 dengan peringkat 89. Kenaikan tersebut dipicu oleh penegakan hukum yang tegas kepada para pelaku tindak korupsi dan suap (Mashabi, 2020).

Menurut *Indonesia Corruption Watch* (ICW), jumlah kasus korupsi selama tahun 2016 sebanyak 482 kasus dengan kerugian negara Rp1,5 triliun, kemudian pada tahun 2017 mengalami penambahan menjadi 576 kasus dengan kerugian negara Rp6,5 triliun (Nasional.tempo.co, 2018). Tren kasus korupsi selama tahun 2019 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2018, yaitu dari 454 kasus di tahun 2018 menjadi 271 kasus di tahun 2019. Menurut peneliti ICW Tama S Langkun, penurunan kasus korupsi di

Indonesia dipengaruhi oleh bergesernya upaya pemerintah dalam memberantas korupsi yaitu dengan upaya pencegahan. Dari 271 kasus tersebut ternyata kasus korupsi bermodus suap lebih dominan dengan kasus sebanyak 51 dengan total nilai suap mencapai Rp169,5 miliar dan nilai pencucian uang mencapai Rp46 miliar. Modus yang nilai korupsinya paling tinggi adalah penyalahgunaan anggaran yang mengakibatkan kerugian negara Rp1,4 triliun (Ramadhan, 2020).

Kasus kecurangan akuntansi akhir-akhir ini marak terjadi di Indonesia yang tak jarang dilakukan oleh para pejabat publik yang dengan sengaja meruntuhkan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu organisasi publik lebih dituntut untuk menciptakan akuntabilitas publik. Menurut Mardiasmo (2002), akuntabilitas publik merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan visi dan misi suatu organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan, melalui laporan keuangan yang dilaksanakan secara periodik. Meskipun skor CPI Indonesia mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dan kasus korupsi berdasarkan ICW mengalami penurunan, namun saat ini Indonesia masih belum bisa keluar dari situasi korupsi. Selain itu, masalah pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia masih menjadi tugas besar pemerintah.

Berdasarkan hasil opini audit BPK atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang pada tahun 2018 meraih predikat (WTP) Wajar Tanpa Pengecualian. Predikat WTP ini diraih Pemerintah Kabupaten Magelang secara berturut-turut yakni pada tahun 2016, 2017 dan 2018. Sebelumnya,

pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Magelang memperoleh opini (WDP) Wajar Dengan Pengecualian (<http://www.bpkp.go.id/>, n.d.). Dengan perolehan hasil opini WTP ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan serta aset daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang telah dilaksanakan dengan tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

BPK masih menemukan beberapa kelemahan pengendalian internal di OPD Kabupaten Magelang yaitu dalam hal penyusunan laporan keuangan antara lain: belanja sosial dan belanja hibah belum sepenuhnya didukung dengan persyaratan serta belum dipertanggungjawabkan dan adanya kelebihan pembayaran insentif pungutan retribusi daerah pada lima OPD. Selain itu ditemukannya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu: kelebihan pembayaran honorarium jasa pelayanan BLUD dan kekurangan volume atas lima pekerjaan di dua OPD. Kelemahan dalam pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut mengindikasikan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan pemerintah. Tentunya jika hal ini tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan celah terjadinya *fraud*.

Pada tahun 2016, 2017 dan 2018, Pemerintah Kabupaten Magelang mendapatkan opini WTP, namun opini WTP bukan menjadi jaminan tidak terdapat kasus kecurangan maupun kemungkinan timbulnya kecurangan pada periode yang akan datang. Hal ini dibuktikan pada awal tahun 2020, terdapat temuan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang yang

melibatkan PNS Pemerintah Kabupaten Magelang. Korupsi yang dilakukan dalam bentuk penyalahgunaan aset seperti penjualan kendaraan dinas dan peralatan kantor yang tidak sesuai dengan prosedur sejak tahun 2017 hingga 2019 dimana hasil penjualannya juga tidak dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Susanto, 2020).

Penelitian mengenai kecurangan akuntansi telah banyak dilakukan. Penelitian terdahulu menunjukkan pengendalian internal, moralitas individu, *personal culture* dan ketaatan aturan akuntansi merupakan faktor yang diduga berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi. Penelitian Sholehah et al., (2018) menemukan bahwa pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi. Hasil ini konsisten dengan penelitian Astuti et al., (2017) yang menemukan bahwa efektivitas pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi. Penelitian yang dilakukan Kusumastuti & Meiranto (2012) menyatakan bahwa keefektifan pengendalian internal tidak memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Meskipun demikian, opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang memberikan catatan atas pengendalian internal yang masih harus dibenahi.

Penelitian yang dilakukan oleh Sholehah et al., (2018) menunjukkan bahwa moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi. Didukung oleh penelitian Udayani & Sari (2017) bahwa moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Namun hal tersebut tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan Astuti

et al., (2017) bahwa moralitas individu tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi. Didukung oleh penelitian Budiantari et al., (2017) bahwa moralitas tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi.

Penelitian Sholehah et al., (2018) menemukan bahwa *personal culture* berpengaruh positif terhadap kecurangan akuntansi. Sedangkan menurut Artini et al., (2014) menyatakan bahwa budaya etis organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sementara penelitian tentang variabel ketaatan aturan akuntansi yang dilakukan oleh Astuti et al., (2017) menyatakan bahwa ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi. Namun hasil yang tidak konsisten diperoleh pada penelitian yang dilakukan oleh Azmi (2017) yang menyatakan bahwa ketaatan aturan akuntansi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Penelitian ini mengembangkan penelitian yang dilakukan oleh (Sholehah et al., 2018) dengan persamaan yang pertama adalah menggunakan semua variabel yaitu pengendalian internal, moralitas individu, *personal culture* dan kecurangan akuntansi. Persamaan ke dua adalah menggunakan teknik *purposive sampling* sebagai metode pengambilan sampel. Persamaan ke tiga yaitu menggunakan alat analisis data yang sama yaitu IBM SPSS.

Perbedaan penelitian ini yang **pertama** yaitu menambahkan variabel ketaatan aturan akuntansi sesuai dengan penelitian Shintadevi (2015) dan Astuti et al., (2017). Alasan penambahan variabel ketaatan aturan akuntansi

yaitu aturan akuntansi dapat menghindari tindakan menyimpang yang dapat merugikan organisasi. Instansi yang melakukan tindak kecurangan akuntansi berarti instansi tersebut tidak berpedoman pada aturan akuntansi, dengan demikian berarti bahwa ketaatan aturan akuntansi merupakan faktor penyebab kecurangan akuntansi. Perbedaan **kedua** yaitu objek penelitian dilakukan di OPD Kabupaten Magelang dikarenakan adanya temuan kasus korupsi aset daerah pada awal tahun 2020 yang merugikan negara lebih dari 2 miliar. Sebagai peraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK tahun 2016, 2017 dan 2018, namun masih terdapat kelemahan pengendalian internal serta ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, opini WTP tidak menjamin bahwa OPD di Kabupaten Magelang bebas dari permasalahan atau kasus kecurangan di periode mendatang.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi?
2. Apakah moralitas individu berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi?
3. Apakah *personal culture* berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi?
4. Apakah ketaatan aturan akuntansi berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengendalian internal terhadap kecurangan akuntansi.

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh moralitas individu terhadap kecurangan akuntansi.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *personal culture* terhadap kecurangan akuntansi.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap kecurangan akuntansi.

D. Kontribusi Penelitian

1. Kontribusi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teori dalam bidang ilmu akuntansi berperilaku. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan terutama masalah pengendalian internal, moralitas individu, *personal culture* dan ketaatan aturan akuntansi terhadap kecurangan akuntansi.

2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa informasi dan saran kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya terutama dalam hal kecurangan akuntansi. Selain itu diharapkan penelitian ini dapat menambah informasi bagi peneliti selanjutnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan akuntansi.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan susunan pembahasan dalam penyusunan skripsi yang dimulai dari pendahuluan dan diakhiri dengan

kesimpulan. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menjelaskan beberapa hal di mulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian serta sistematika pembahasan. Latar belakang masalah memuat penjelasan fenomena, *research gap* serta fakta-fakta yang relevan dengan fenomena untuk merumuskan alasan pentingnya dilakukan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan menjelaskan beberapa hal di mulai dari telaah teori, telaah penelitian sebelumnya, perumusan hipotesis serta model penelitian. Telaah teori terdiri dari *grand theory* yang digunakan untuk menganalisis variabel penelitian untuk merumuskan hipotesis.

BAB III METODA PENELITIAN

Pada bab ini akan menjelaskan beberapa hal di mulai dari populasi dan sampel, data penelitian, definisi operasional variabel, metoda analisis data serta pengujian hipotesis. Definisi operasional variabel membahas mengenai definisi variabel serta pengukuran variabel.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan pengujian yang dilakukan meliputi uji statistik deskriptif, uji kualitas data serta pengujian hipotesis. Uji statistik deskriptif menggambarkan statistik deskriptif data, statistik deskriptif responden serta statistik deskriptif variabel penelitian. Uji kualitas data

terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi linear berganda, uji koefisien determinasi, uji F dan uji t.

BAB V KESIMPULAN

Pada bab ini merupakan bagian terakhir dalam penyusunan skripsi. Bab ini menjelaskan beberapa hal mengenai kesimpulan dari hasil analisis data, keterbatasan penelitian serta saran untuk peneliti selanjutnya..

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAH HIPOTESIS

A. Telaah Teori

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan atau *agency theory* dicetuskan pertama kali oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Teori ini menjelaskan bahwa manajer di suatu perusahaan sebagai agen dan pemegang saham sebagai *principal*. Teori keagenan menggambarkan hubungan antara *principal* dengan agen dimana *principal* sebagai pemilik dan agen sebagai pihak manajemen (Jensen & Meckling, 1976). Pemegang saham (*principal*) memiliki hak untuk mendelegasikan wewenang atas pengambilan keputusan bisnis kepada manajer (agen). Hubungan antara *principal* dengan agen tak jarang menemui permasalahan. Manajer (agen) tidak selalu membuat keputusan untuk memenuhi kepentingan *principal*.

Perbedaan kepentingan antara agen dan *principal* di dalam suatu perusahaan akan menimbulkan asimetri informasi. Selain itu jika terdapat dua kepentingan yang berbeda seperti ini akan membuka peluang tindakan manajemen laba yang dilakukan manajer. Cara mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan dengan hubungan keagenan ini, Jensen dan Meckling mengembangkan upaya sebagai berikut:

1) *Monitoring Cost*

Monitoring cost merupakan biaya yang harus ditanggung *principal* untuk memonitor perilaku agen. *Monitoring cost* dapat

dilakukan dengan mengamati, mengukur dan mengontrol perilaku agen.

2) *Bonding Cost*

Bonding cost merupakan biaya yang ditanggung oleh agen untuk menjamin agen tersebut akan bertindak demi kepentingan *principal*. *Bonding cost* dapat dilakukan dengan menetapkan dan mematuhi mekanisme serta prosedur yang ada untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai kepentingan *principal*.

3) *Residual Loss*

Residual loss merupakan kerugian yang harus ditanggung oleh *principal*. *Residual loss* ini disebabkan berkurangnya kemakmuran *principal* yang diakibatkan karena perbedaan keputusan agen dan keputusan *principal*.

Disektor publik teori keagenan dipergunakan untuk menganalisis hubungan *principal* dan agen dalam kaitannya dengan penganggaran sektor publik (Latifah, 2010). Implikasi teori keagenan muncul dalam proses penyusunan anggaran dilihat dari dua perspektif yaitu hubungan antara rakyat dengan legislatif, dan legislatif dengan eksekutif. Ditinjau dari perspektif hubungan keagenan antara legislatif dengan eksekutif, eksekutif adalah agen dan legislatif adalah *principal* (Halim & Abdullah, 2006). Dilihat dari perspektif hubungan keagenan legislatif dengan rakyat, legislatif merupakan agen yang akan membela kepentingan rakyat (*principal*), akan tetapi tidak ada kejelasan mekanisme dan pengaturan

serta pengendalian pendelegasian kewenangan rakyat terhadap legislatif. Hal tersebut menyebabkan distorsi anggaran yang disusun pihak legislatif sehingga anggaran tidak dapat mencerminkan alokasi pemenuhan sumber daya kepada masyarakat, namun justru cenderung mengutamakan *self-interest* para pihak legislatif tersebut. Jika hal ini terjadi, besar kemungkinan anggaran yang disahkan adalah alat untuk melancarkan aksi pencurian hak rakyat atau sering dikenal dengan istilah korupsi (Keefer & Khemani, 2004).

2. Kecurangan Akuntansi

Menurut Arens et al., (2014), kecurangan didefinisikan sebagai upaya penipuan yang disengaja yang bertujuan untuk mengambil harta atau hak orang atau pihak lain. Selain itu kecurangan akuntansi juga didefinisikan sebagai salah saji laporan keuangan yang dilakukan dengan sengaja. Dua kategori yang utama adalah pelaporan keuangan yang curang dan penyalahgunaan aset. Kecurangan dalam pelaporan keuangan merupakan salah saji yang disengaja yang bertujuan menipu para pemakai laporan keuangan. Penyalahgunaan (*misappropriation*) aset adalah kecurangan yang melibatkan pencurian aset entitas. Menurut Tuanakotta (2010), ACFE (*Association of Certified Fraud Examiner*) membagi kecurangan ke dalam tiga jenis yaitu:

1) Kecurangan laporan keuangan (*Financial Statement Fraud*)

Kecurangan laporan keuangan didefinisikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji

material. Kecurangan ini dapat berupa kecurangan finansial atau kecurangan non finansial.

2) Penyimpangan atas aset (*Aset Misappropriation*)

Aset misappropriation meliputi penyalahgunaan atau pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain. Penyimpangan aset merupakan bentuk *fraud* yang mudah dideteksi.

3) Korupsi (*Corruption*)

Korupsi adalah salah satu jenis kecurangan (*fraud*) yang sulit dideteksi. Hal ini dikarenakan adanya kerjasama antara pihak yang terlibat dengan pihak lain. Umumnya korupsi terjadi di negara berkembang yang memiliki penegakan hukum yang lemah. Penyalahgunaan wewenang / konflik kepentingan, penyuapan, penerimaan tidak sah dan pemerasan ekonomi menyebabkan beberapa kasus korupsi menjadi tidak terdeteksi.

Pertimbangan terpenting dalam mengungkap tindak kecurangan dapat dilakukan dengan mengidentifikasi kemungkinan kondisi yang menyebabkan kecurangan. Kondisi penyebab kecurangan tersebut telah yang diuraikan dalam SAS 99 (AU 316) dan biasa disebut dengan segitiga kecurangan (*fraud triangle*) antara lain:

1) Insentif / Tekanan

Merupakan situasi dimana manajemen atau pegawai lain memiliki insentif atau tekanan untuk menyalahgunakan aset yang material. Tekanan keuangan adalah dorongan atau insentif yang

umum bagi pegawai yang menyalahgunakan aset. Pegawai yang memiliki kewajiban keuangan yang besar, atau menghadapi masalah penyalahgunaan obat-obatan atau judi, mungkin mencuri untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Pegawai yang tidak puas mungkin mencuri karena merasa berhak atau sebagai bentuk serangan terhadap atasan mereka.

2) Kesempatan

Merupakan situasi yang membuka kesempatan bagi manajemen atau pegawai untuk melakukan kecurangan. Perputaran personil akuntansi atau kelemahan lain dalam proses akuntansi dan informasi dapat menciptakan kesempatan terjadinya salah saji.

3) Sikap / Rasionalisasi

Merupakan serangkaian nilai-nilai etis yang seolah-olah membolehkan seseorang yang dengan sengaja melakukan tindakan kecurangan. Bertindak tidak jujur atau berada dalam lingkungan yang cukup menekan akan membuat mereka merasionalisasi tindakan yang menyebabkan kecurangan.

Menurut Simanjuntak (2005) teori GONE yang terdiri dari *greed* (keserakahan), *opportunity* (kesempatan), *need* (kebutuhan) dan *eksposure* (pengungkapan). *Opportunity* dan *eksposure* berhubungan dengan organisasi yang bisa disebut faktor umum seperti pengendalian internal. Sedangkan *greed* dan *need* berhubungan dengan individu pelaku

kecurangan atau faktor individu. Faktor pendorong seseorang melakukan kecurangan disebabkan oleh faktor moral yaitu *greed* atau keserakahan.

Teori keagenan menyatakan bahwa hubungan *principal* dengan agen terkadang menemui ketidaksesuaian, yaitu kebijakan yang dibuat agen yang tidak sesuai dengan *principal*. Di sektor publik, agen (pemerintah) tidak selalu membuat keputusan untuk memenuhi kepentingan *principal* (masyarakat). Perbedaan kepentingan yang terjadi akan menimbulkan asimetri informasi dan berpeluang timbul kecurangan (Jensen & Meckling, 1976). Hubungan antara teori agensi dengan kecurangan akuntansi yaitu, kecurangan akuntansi merupakan akibat yang ditimbulkan oleh perbedaan kepentingan antara agen (pemerintah) dengan *principal* (masyarakat). Untuk meminimisir tindak kecurangan di sektor publik dilakukan dengan menjamin pengendalian internal, moralitas individu, *personal culture* dan ketaatan aturan akuntansi agar tetap terkendalikan dengan baik dalam suatu instansi.

3. Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi (2002), pengendalian internal merupakan proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen serta personel organisasi untuk memberikan keyakinan tentang keandalan laporan keuangan, kepatuhan hukum serta efektivitas operasi. Arens et al., (2014) menyatakan pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang bertujuan memberikan kepastian yang layak bagi manajemen bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarannya. Terdapat tiga tujuan

umum manajemen dalam merancang pengendalian internal yang efektif antara lain:

1) Reliabilitas pelaporan keuangan

Tanggung jawab seorang manajer yaitu menyiapkan laporan bagi para investor, kreditor dan pemakai lainnya. Tanggung jawab manajer dalam hal tanggungjawab hukum serta tanggung jawab profesional yang bertujuan memastikan informasi disajikan secara wajar dengan prinsip akuntansi berterima umum (GAAP) serta IFRS. Pengendalian internal yang efektif atas pelaporan keuangan bertujuan untuk memenuhi tanggungjawab dalam pelaporan keuangan tersebut.

2) Efisiensi dan efektifitas operasi

Dengan adanya pengendalian internal perusahaan akan mendorong pemakaian sumber daya yang efektif dan efisien untuk mengoptimalkan tujuan perusahaan. Tujuan dari pengendalian ini adalah memperoleh informasi baik itu informasi keuangan dan non keuangan yang akurat tentang operasi perusahaan yang digunakan dalam pengambilan keputusan.

3) Ketaatan pada hukum dan peraturan

Semua perusahaan baik publik, non publik dan nirlaba harus mentaati peraturan akuntansi. *Section 404* mengharuskan perusahaan publik untuk mengeluarkan laporan keefektifan pengendalian internal atas pelaporan keuangan.

Komponen pengendalian internal yang dikeluarkan COSO merupakan kerangka kerja pengendalian internal yang terdiri dari lima komponen pengendalian internal. Komponen pengendalian internal tersebut dirancang serta diimplementasikan oleh manajemen untuk memberikan kepastian yang layak bahwa tujuan pengendalian perusahaan akan tercapai. Komponen pengendalian internal COSO meliputi:

1) Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian terdiri atas tindakan, kebijakan serta prosedur yang mencerminkan sikap manajemen puncak, para direktur dan pemilik entitas secara keseluruhan mengenai pentingnya pengendalian internal bagi entitas. Jika tanpa lingkungan pengendalian yang efektif maka keempat komponen lainnya mungkin tidak akan menghasilkan pengendalian internal yang efektif pula.

2) Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Merupakan suatu bentuk tindakan manajemen dalam mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko pengendalian internal. Misalnya risiko yang relevan terhadap penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan GAAP.

3) Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)

Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang memastikan bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil untuk menangani risiko dalam rangka mencapai tujuan entitas. Aktivitas pengendalian terbagi menjadi lima jenis yaitu: pemisahan tugas yang

memadai, otorisasi sesuai transaksi dan aktivitas, dokumen dan catatan yang memadai, pengendalian fisik aset dan catatan serta pemeriksaan kinerja secara independen.

4) Informasi dan Komunikasi

Sistem informasi dan komunikasi akuntansi entitas bertujuan untuk mencatat, memproses dan melaporkan transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas. Sistem informasi dan komunikasi juga bertujuan untuk mempertahankan akuntabilitas aset terkait.

5) Pemantauan

Pemantauan merupakan aktivitas yang berhubungan dengan penilaian kualitas pengendalian internal yang dilakukan oleh manajemen secara berkelanjutan. Tujuan aktivitas ini adalah menyesuaikan pengendalian internal suatu perusahaan telah sesuai dengan kondisi saat itu.

Pengendalian internal dalam arti sempit adalah suatu prosedur untuk memeriksa ketelitian data. Pengendalian internal dalam arti luas merupakan suatu sistem sosial yang memiliki makna khusus yang berada di perusahaan (Hartadi, 1992). Suatu entitas baik itu swasta maupun pemerintahan sangat memerlukan pengendalian internal yang baik. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pihak atau anggota organisasi tersebut.

4. Moralitas Individu

Moral atau tingkah laku akan menjadi faktor pemicu kecurangan terhadap laporan keuangan. Kecurangan bisa disebabkan oleh tingkah laku rasionalisasi. Perubahan tingkah laku atau moral individu akan menjadikan orang tersebut menyalahgunakan kas / aktiva yang ada. Terjadinya penyalahgunaan tersebut akan ditutupi melalui manipulasi laporan keuangan (Tunggal, 2009). Menurut Bertens (1993), moral adalah norma serta nilai yang menjadi pegangan bagi setiap individu atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Moralitas dapat diartikan keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik atau buruknya sifat manusia.

Menurut Welton et al., (1994) menyatakan kemampuan individu menyelesaikan dilema etika dipengaruhi penalaran moral individu tersebut. Menurut Kohlberg (1995) menyatakan bahwa terdapat tiga tahap perkembangan moral yaitu:

1) Tahapan *Pre-Conventional*

Tahap *Pre-Conventional* merupakan tahapan pertama yang paling rendah dimana individu akan tunduk dan takut pada hukum yang telah ada. Individu pada level moral ini memandang kepentingan pribadi sebagai hal utama dalam melakukan tindakan.

2) Tahapan *Conventional*

Tahap *Conventional* merupakan tahapan ke dua dimana individu memiliki dasar pertimbangan moral yang berkaitan dengan pemahaman hukum, aturan sosial masyarakat, kewajiban dan keadilan

di dalam lingkungan sosialnya. Manajemen pada tahap ini mulai membentuk moralitas manajemennya dengan menaati peraturan seperti aturan akuntansi untuk menghindari kecurangan.

3) Tahapan *Post-Contventional*

Tahap *Post-Contventional* adalah tahap dimana individu telah menunjukkan kematangan moral manajemen yang tinggi, pada tahap ini juga dikatakan sebagai tahap tertinggi. Kematangan moral adalah dasar pertimbangan manajemen disaat menyikapi isu etis terkait perilaku pertanggungjawaban sosial kepada orang lain. Manajemen yang mempunyai moralitas tinggi diharapkan tidak akan melakukan perilaku menyimpang yang berpotensi menimbulkan kecurangan akuntansi karena tindakannya berkaca pada hukum universal.

5. *Personal Culture*

Berbagai faktor-faktor penyebab kecurangan akuntansi bisa disebabkan faktor eksternal perusahaan dan faktor internal dalam diri individu (Sholehah et al., 2018). Cara yang efektif untuk mencegah kecurangan dengan pengendalian anti kecurangan yang didasarkan nilai-nilai inti perusahaan sehingga nilai-nilai tersebut membantu menciptakan budaya jujur dan etika tinggi (Arens et al., 2014). Menurut Ramamoorti (2008), faktor perilaku merupakan akar dari permasalahan mengenai *fraud*. Perilaku individu merupakan kecenderungan untuk bertindak laku baik tingkah laku yang bertentangan maupun yang tidak bertentangan dengan pola-pola norma yang dilembagakan (Mariana, 2008).

Menurut Sholehah et al., (2018), perilaku individu harus sesuai dengan norma yang diharapkan (prestatif), sedangkan perilaku individu yang tidak diharapkan (nonprestatif) adalah perilaku individu yang mengganggu keseimbangan. Sholehah et al., (2018) juga menyebutkan bahwa budaya individu atau budaya kolektif akan membawa pengaruh terhadap kontrol perilaku seseorang. Budaya individualistik memiliki konsep diri yang independen, dimana individu fokus pada diri masing-masing seperti kemampuan diri, kecerdasan, tujuan serta kecenderungan individu dalam mengungkapkan suatu hal di depan umum. Budaya kolektif memiliki konsep diri interdependen dimana setiap individu bersosialisasi untuk menyesuaikan diri dengan kelompok dimana mereka bergabung termasuk bersimpati, mengikuti aturan yang telah dibuat bersama serta bertindak sesuai apa yang diterima secara sosial. Dengan demikian budaya organisasi berperan penting dalam membentuk perilaku etis dalam suatu organisasi atau instansi.

Menurut Sholehah et al., (2018), semakin besar budaya individu yang dibawa dalam organisasi akan membuat kecenderungan melakukan kecurangan menjadi semakin besar. Sebab setiap individu memiliki peran yang berbeda dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Perbedaan konsep mengenai diri membawa pengaruh yang besar pada perkembangan kognisi, motivasi serta emosi. Budaya membawa pengaruh atas perkembangan kepribadian manusia khususnya berkaitan dengan *locus of control* dan *self esteem*.

6. Ketaatan Aturan Akuntansi

Ketaatan aturan akuntansi merupakan kewajiban organisasi untuk mematuhi ketentuan aturan akuntansi dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan pembuatan laporan keuangan agar tercipta transparansi, akuntabilitas dan laporan keuangan yang dihasilkan efektif, handal serta akurat informasinya (Shintadevi, 2015). Menurut Gustina (2018), aturan dalam pembuatan laporan keuangan harus sesuai dengan standar akuntansi yang berpedoman pada PSAK yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, yang mengatur unsur-unsur penyajian pelaporan keuangan. Aturan dalam akuntansi sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan yang handal akan memberikan informasi yang akurat.

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), aturan adalah cara (ketentuan, patokan, petunjuk, perintah) yang ditetapkan supaya dituruti atau dilakukan. Menurut Rahmawati (2012) aturan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan dan tidak boleh dilanggar. Menurut Azmi (2017), aturan akuntansi dapat menghindari tindakan menyimpang yang akan merugikan organisasi. Apabila laporan keuangan dibuat tidak sesuai aturan akuntansi yang berlaku maka akan menimbulkan perilaku tidak etis sehingga memicu terjadinya kecurangan akuntansi.

Menurut Arista (2015), aturan akuntansi dibuat sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Standar akuntansi terdapat aturan-aturan yang harus digunakan dalam pengukuran dan penyajian laporan keuangan berpedoman terhadap aturan-aturan yang dikeluarkan IAI. Oleh karena itu

sangat dibutuhkan aturan untuk menjaga keandalan informasi tersebut dan menghindari tindakan yang dapat merugikan perusahaan atau organisasi.

B. Telaah Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1
Telaah Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
1.	(Sholehah et al., 2018)	Pengaruh Pengendalian Internal, Moralitas Individu dan <i>Personal Culture</i> Terhadap Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris Pada OPD Provinsi Gorontalo)	Pengendalian Internal berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan akuntansi. Moralitas individu berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kecurangan akuntansi dan <i>personal culture</i> berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kecurangan akuntansi
2	(Udayani & Sari, 2017)	Pengaruh Pengendalian Internal Dan Moralitas Individu Pada Kecenderungan Kecurangan Akuntansi	Pengendalian internal dan moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi
3	(Indriastuti et al., 2016)	Analisis Pengaruh Asimetri Informasi, Pengendalian Internal, Persepsi Kesesuaian Kompensasi, Moralitas Individu dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecurangan Akuntansi	Asimetri informasi berpengaruh signifikan positif terhadap kecurangan akuntansi. Pengendalian internal, persepsi kesesuaian kompensasi dan moralitas individu berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan akuntansi. Ketaatan aturan akuntansi tidak berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi
4	(Astuti et al., 2017)	Pengaruh Moralitas Individu, Ketaatan Aturan Akuntansi Dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan (<i>Fraud</i>) Akuntansi Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Kabupaten Buleleng	Moralitas individu tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (<i>fraud</i>) akuntansi. Ketaatan aturan akuntansi dan efektivitas pengendalian internal berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan (<i>fraud</i>) akuntansi

Tabel 2.1
Telaah Penelitian Sebelumnya (Lanjutan)

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
5	(Gustina, 2018)	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada SKPD Kabupaten Indragiri Hulu	Sistem pengendalian internal dan ketaatan aturan akuntansi berpengaruh signifikan positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi
6	(Budiantari et al., 2017)	Pengaruh Efektifitas Pengendalian Internal, Profesionalisme Badan Pengawas Dan Moralitas Terhadap Kecenderungan Kecurangan (<i>Fraud</i>) Akuntansi (Studi Empiris Pada LPD Se-Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung)	Efektifitas pengendalian internal berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan (<i>fraud</i>) akuntansi. Profesionalisme badan pengawas berpengaruh signifikan positif terhadap kecenderungan kecurangan (<i>fraud</i>) akuntansi. Moralitas tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (<i>fraud</i>) akuntansi
7	(Azmi, 2017)	Pengaruh Ketaatan Aturan Akuntansi, Kesesuaian Kompensasi Dan Asimetri Informasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Pada BUMN di Kota Padang)	Ketaatan aturan akuntansi dan kompensasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Asimetri informasi berpengaruh signifikan positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi
8	(Shintadevi, 2015)	Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi dengan Perilaku Tidak Etis Sebagai Variabel Intevening Studi Pada Universitas Negeri Yogyakarta	Terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara keefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi dan kesesuaian kompensasi terhadap perilaku tidak etis. Terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara keefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi dan kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Tabel 2.1
Telaah Penelitian Sebelumnya (Lanjutan)

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
9	(Artini et al., 2014)	Pengaruh Budaya Etis Organisasi Dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada SKPD Kabupaten Jembrana	Budaya etis organisasi dan efektivitas pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi
10	(Rahmaidha, 2016)	Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kecurangan Akuntansi	Keefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi dan kepuasan kerja memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan akuntansi.
11	(Kusumastuti & Meiranto, 2012)	Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Dengan Perilaku tidak Etis sebagai Variabel Intervening	Keefektifan pengendalian internal, kepuasan kompensasi, ketaatan aturan akuntansi, keefektifan asimetri informasi internal dan moralitas manajemen berpengaruh terhadap perilaku tidak etis. Sedangkan keefektifan pengendalian internal, kepuasan kompensasi, ketaatan aturan akuntansi, keefektifan asimetri informasi internal dan moralitas manajemen tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Perilaku tidak etis memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

Sumber: data penelitian terdahulu diolah, 2020.

C. Perumusan Hipotesis

1. Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Kecurangan Akuntansi

Menurut Mulyadi (2002), pengendalian internal merupakan proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen serta personel organisasi untuk memberikan keyakinan tentang keandalan laporan keuangan, kepatuhan hukum serta efektivitas operasi. Pengendalian internal yang baik akan melindungi perusahaan dari tindakan kecurangan termasuk kecurangan akuntansi. Menurut Astuti et al., (2017), efektivitas pengendalian internal merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi. Lemahnya pengendalian internal seperti kurangnya pengawasan akan memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Menurut Udayani & Sari (2017), pengendalian internal yang efektif akan menutup peluang perilaku tidak etis dan kecurangan akuntansi.

Teori keagenan menjelaskan bahwa dalam hubungan antara *principal* dengan agen terkadang terdapat konflik. Manajer (agen) tidak selalu membuat keputusan untuk memenuhi kepentingan *principal* (Jensen & Meckling, 1976). Untuk meminimalisir konflik antara agen dan *principal* maka *principal* perlu melakukan *monitoring* perilaku agen. Pengendalian internal merupakan bentuk *monitoring* terhadap perilaku pemerintah untuk mengurangi biaya agensi yaitu mencegah terjadinya kecurangan akuntansi. Bentuk pengendalian internal yang dilakukan di sektor pemerintahan adalah dengan melakukan pengawasan internal atas

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintahan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Hubungan teori agensi dengan pengendalian internal yaitu dengan adanya pengendalian internal akan memberikan dukungan terhadap pencapaian tujuan yang selaras dalam organisasi, khususnya dalam organisasi sektor publik yaitu meminimalisir adanya asimetri informasi serta konflik antara *principal* (masyarakat) dengan agen (pemerintah).

Riset sebelumnya yang dilakukan oleh Rahmaidha (2016), menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara keefektifan pengendalian internal terhadap kecurangan akuntansi. Pengendalian internal yang efektif mampu mengurangi peluang dan kesempatan pegawai dalam melakukan kecurangan akuntansi. Apabila pengendalian internal di suatu instansi buruk, maka akan semakin tinggi peluang kecurangan akuntansi. Menurut penelitian Sholehah et al., (2018) menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi di OPD Provinsi Gorontalo. Artinya semakin baik pengendalian internal di suatu instansi akan menurunkan tingkat kecurangan akuntansi. Hal tersebut didukung oleh penelitian (Indriastuti dkk, 2016). Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1. Pengendalian Internal Berpengaruh Negatif Terhadap Kecurangan Akuntansi.

2. Pengaruh Moralitas Individu Terhadap Kecurangan Akuntansi

Moralitas individu merupakan sikap dan perilaku yang baik dimana seseorang tersebut tidak meminta balasan atau tanpa pamrih (Udayani &

Sari, 2017). Setiap individu yang memiliki moralitas yang baik akan menghindari tindakan yang menyimpang dari norma dan aturan yang ada. Dalam hal ini, pegawai yang memiliki moralitas individu yang baik akan melaksanakan fungsi keuangan/akuntansi dengan hati-hati, jujur dan bertanggungjawab sehingga akan meminimalkan peluang kecurangan akuntansi.

Teori agensi menyatakan bahwa hubungan antara *principal* dengan agen terkadang menemui permasalahan dimana manajer (agen) tidak selalu membuat keputusan untuk memenuhi kepentingan *principal*. Dengan adanya perbedaan kepentingan tersebut akan menimbulkan asimetri informasi dan berpeluang timbul kecurangan (Jensen & Meckling, 1976). Moralitas individu memiliki peran sebagai *bonding cost* yaitu pengendali bagi setiap individu agar bertindak sesuai norma dan aturan yang berlaku untuk meminimalisir kecurangan akuntansi. Hubungan teori agensi dengan moralitas individu yaitu individu yang memiliki moral yang baik akan cenderung bertindak sesuai dengan kaidah norma yang berlaku di masyarakat. Tindak kecurangan akuntansi di sektor publik sendiri bukan merupakan perwujudan kesesuaian terhadap norma. Oleh karena itu, kesesuaian tindakan sesuai norma yang berlaku tersebut akan membuat individu berkelakuan baik dan anti terhadap tindak kecurangan, dalam hal ini pemerinah akan selalu mengutamakan kepentingan rakyatnya.

Riset sebelumnya yang dilakukan oleh Sholehah et al., (2018) menunjukkan moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kecurangan

akuntansi. Artinya kecenderungan melakukan kecurangan akuntansi lebih tinggi dilakukan oleh orang dengan moralitas rendah. Hasil yang sama juga diperoleh melalui penelitian yang dilakukan oleh (Udayani & Sari, 2017). Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2. Moralitas Individu Berpengaruh Negatif Terhadap Kecurangan Akuntansi.

3. Pengaruh *Personal Culture* Terhadap Kecurangan Akuntansi

Menurut Sholehah et al., (2018), budaya dengan ciri *individualistic* (*personal culture*) memiliki konsep diri yang independen. Konsep independen ini menjadikan individu fokus pada pribadi dan sifat internal mereka seperti kemampuan individu, kecerdasan, pembawaan personal, tujuan dan kecenderungan mengungkapkan hal di depan umum. Seseorang dengan budaya *individualistic* cenderung akan bertindak tidak sesuai aturan dan tidak diterima secara sosial. Oleh karena itu semakin besar budaya individu (*personal culture*) yang dibawa dalam suatu organisasi akan membuat kecenderungan terjadinya kecurangan akuntansi juga semakin besar.

Teori keagenan merupakan teori untuk menganalisis hubungan *principal* dan agen dalam sektor publik (Latifah, 2010). Dalam teori keagenan disebutkan bahwa *principal* (masyarakat) menilai adanya ketidaksesuaian kebijakan agen (pemerintah). Di sektor publik, sangat rentan sekali terjadi ketimpangan tersebut sehingga berpotensi timbul kecurangan (Jensen & Meckling, 1976). *Personal culture* berperan sebagai

bonding cost yang akan menjamin agen tetap bertindak sesuai kepentingan *principal*. Hubungan teori agensi dengan *personal culture* yaitu dengan adanya budaya jujur, etika yang tinggi, sikap serta motivasi kerja yang baik dalam suatu organisasi akan mengarahkan individu anggota organisasi tersebut terhadap pencapaian tujuan, dalam hal ini yaitu tujuan organisasi sektor publik yang harus mengedepankan kepentingan masyarakat.

Riset sebelumnya yang dilakukan oleh Sholehah et al., (2018) menunjukkan bahwa *personal culture* berpengaruh positif terhadap kecurangan akuntansi. Artinya, semakin besar budaya individu yang dibawa dalam organisasi akan membuat kecenderungan melakukan kecurangan akuntansi semakin besar. Hal ini dikarenakan perbedaan konsep diri tiap individu yang berpengaruh pada perkembangan kognisi, motivasi serta emosi, selain itu budaya juga berpengaruh pada perkembangan kepribadian manusia. Budaya individualistik memiliki konsep diri yang independen sedangkan budaya kolektif memiliki konsep interindependen. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3. *Personal Culture* Berpengaruh Positif Terhadap Kecurangan Akuntansi.

4. Pengaruh Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecurangan Akuntansi

Ketaatan aturan akuntansi merupakan kewajiban organisasi untuk mematuhi ketentuan aturan akuntansi dalam melaksanakan pengelolaan

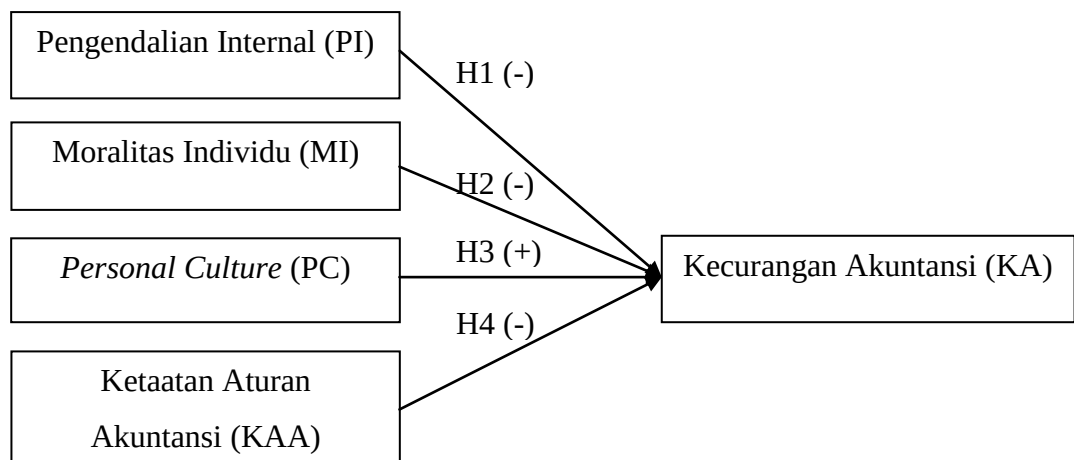
keuangan dan pembuatan laporan keuangan agar tercipta transparansi, akuntabilitas dan laporan keuangan yang dihasilkan efektif, handal serta akurat informasinya (Shintadevi, 2015). Menurut Azmi (2017) aturan akuntansi dapat menghindari tindakan menyimpang yang akan merugikan organisasi. Apabila laporan keuangan dibuat tidak sesuai aturan akuntansi yang berlaku maka akan menimbulkan perilaku tidak etis sehingga memicu terjadinya kecurangan akuntansi.

Teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan hubungan *principal* dengan agen dimana agen tidak selalu membuat kebijakan yang sesuai dengan keinginan *principal*. Di sektor publik, agen (pemerintah) tidak selalu membuat keputusan untuk memenuhi kepentingan *principal* (masyarakat). Dengan adanya perbedaan kepentingan ini akan menimbulkan asimetri informasi dan berpeluang timbul kecurangan (Jensen & Meckling, 1976). Ketaatan aturan akuntansi berperan sebagai *bonding cost* yang akan menjamin bahwa agen tetap bertindak mengikuti aturan akuntansi yang berlaku untuk meminimalisir peluang kecurangan akuntansi. Hubungan teori agensi dengan ketaatan aturan akuntansi yaitu ketika suatu organisasi dalam hal ini organisasi sektor publik menaati aturan akuntansi yang berlaku terutama dalam pengakuan, pengungkapan serta penyajian laporan keuangan maka akan sangat kecil terjadinya tindak kecurangan akuntansi yang dilakukan pegawai di instansi tersebut. Oleh karena itu ketaatan aturan akuntansi menjadi salah satu cara untuk mengurangi bias antara agen dengan *principal*.

Penelitian yang dilakukan oleh Astuti et al., (2017) menunjukkan bahwa ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi. Artinya semakin taat pada aturan akuntansi maka akan meminimalisir kecurangan akuntansi. Hasil yang sama juga diperoleh melalui penelitian yang dilakukan oleh (Shintadevi, 2015). Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4. Ketaatan Aturan Akuntansi Berpengaruh Negatif Terhadap Kecurangan Akuntansi.

D. Model Penelitian



Gambar 2.1
Model Penelitian

BAB III

METODA PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Populasi (*population*) yaitu sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu (Indriantoro & Supomo, 1999). Penelitian ini akan dilaksanakan di OPD Kabupaten Magelang. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja di 24 OPD di Kabupaten Magelang. Pemilihan populasi dikarenakan Kabupaten Magelang sebagai peraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama tiga tahun berturut-turut yaitu tahun 2016, 2017 dan 2018. Sebagai peraih opini WTP, namun masih terdapat kelemahan pengendalian internal serta ditemukannya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, opini WTP tidak menjamin bahwa OPD di Kabupaten Magelang bebas dari permasalahan atau kasus kecurangan di periode mendatang. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya kasus korupsi aset daerah.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai yang melaksanakan tugas dan fungsi keuangan / akuntansi di OPD Kabupaten Magelang. Pengambilan sampel di dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan tidak secara acak. Pemilihan sampel dengan *purposive sampling* digunakan karena informasi yang akan diambil berdasarkan tujuan atau kriteria tertentu yang diharapkan peneliti (Indriantoro & Supomo, 1999). Alasan pemilihan sampel

tersebut dikarenakan merupakan pihak yang memiliki kewenangan di bidang keuangan organisasi perangkat daerah (OPD). Kriteria sampel yang digunakan adalah:

1. Pegawai yang melaksanakan tugas dan fungsi keuangan / akuntansi di OPD Kabupaten Magelang.
2. Pegawai yang bekerja di bagian keuangan / akuntansi yang memiliki masa kerja minimal 1 tahun.

B. Data Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini menggunakan jenis data subjek yang berupa pertanyaan tertulis (kuesioner). Data subjek adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subjek penelitian (responden). Data subjek selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan bentuk tanggapan (respon) yang diberikan, yaitu: lisan (verbal), tertulis dan ekspresi. Respon yang diberikan sebagai tanggapan atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dalam wawancara disebut sebagai respon verbal. Sedangkan tanggapan atas pertanyaan tertulis (kuesioner) yang diajukan oleh peneliti disebut sebagai respon tertulis. Respon ekspresi diperoleh peneliti dari hasil observasi (Indriantoro & Supomo, 1999).

Sumber data di dalam sebuah penelitian merupakan hal penting yang menjadi dasar pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer

merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden. Ada dua metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data primer, yaitu: (1) metode survei dan (2) metode observasi (Indriantoro & Supomo, 1999). Data primer yang diperoleh termasuk ke dalam kategori data kuantitatif. Data kuantitatif ini nantinya akan diolah menggunakan aplikasi pengolahan data IBM SPSS.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan survei. Metode survei adalah penelitian yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta tentang gejala atas permasalahan yang timbul. Metode survei digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi tentang populasi yang besar dengan menggunakan sampel yang kecil. Populasi tersebut meliputi orang, instansi, lembaga, organisasi, unit kemasyarakatan dan lain-lain, namun sumber utamanya adalah orang. Tujuan utama survei antara lain menggambarkan keadaan saat itu, mengidentifikasi secara terukur keadaan sekarang dan menentukan hubungan kejadian yang spesifik. Survei tersebut dilakukan di OPD Kabupaten Magelang melalui kuesioner yang diberikan kepada responden, kemudian dilakukan penyeleksian kuesioner yang sudah terkumpul untuk mengeliminasi pengisian kuisisioner yang tidak lengkap.

C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

Tabel 3.1
Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

No	Variabel	Definisi	Pengukuran
Dependen			
1.	Kecurangan Akuntansi (KA)	Kecurangan didefinisikan sebagai upaya penipuan yang disengaja yang bertujuan untuk mengambil harta atau hak orang atau pihak lain. Selain itu kecurangan akuntansi juga didefinisikan sebagai salah saji laporan keuangan yang dilakukan dengan sengaja. (Arens et al., 2014)	Instrumen penelitian diacu dari penelitian (Sholehah et al., 2018) yang terdiri dari 9 pernyataan dengan indikator : 1) Kecurangan laporan keuangan 2) Penyalahgunaan aset 3) Korupsi Instrumen diukur menggunakan skala linkert 5 poin, point 1: Sangat Tidak Setuju (STS), point 2: Tidak Setuju (TS), point 3: Netral (N), point 4: Setuju (S), point 5: Sangat Setuju (SS).
Independen			
2.	Pengendalian Internal (PI)	Pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang bertujuan memberikan kepastian yang layak bagi manajemen bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarannya. (Arens et al., 2014)	Instrumen penelitian ini diacu dari penelitian (Rahmaidha, 2016) yang terdiri dari 16 pernyataan dengan indikator: 1. Lingkungan pengendalian 2. Penilaian risiko 3. Kegiatan pengendalian 4. Informasi dan komunikasi 5. Pemantauan Instrumen diukur menggunakan skala linkert 5 poin, point 1: Sangat Tidak Setuju (STS), point 2: Tidak Setuju (TS), point 3: Netral (N), point 4: Setuju (S), point 5: Sangat Setuju (SS).
3.	Moralitas Individu (MI)	Moralitas merupakan tekad untuk mengikuti apa yang ada dalam hati manusia dan disadari sebagai kewajiban mutlak. (Sholehah et al., 2018)	Instrumen penelitian ini diacu dari penelitian (Sholehah et al., 2018) yang terdiri dari 6 pernyataan dengan indikator: 1. Tahap <i>pre conventional</i> 2. Tahap <i>conventional</i> 3. Tahap <i>post conventioal</i>

Tabel 3.2
Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel (Lanjutan)

No	Variabel	Definisi	Pengukuran
			Instrumen diukur menggunakan skala linkert 5 poin, point 1: Sangat Tidak Setuju (STS), point 2: Tidak Setuju (TS), point 3: Netral (N), point 4: Setuju (S), point 5: Sangat Setuju (SS).
4.	<i>Personal Culture (PC)</i>	Budaya dengan ciri individualistik memiliki konsep diri yang independen, sedangkan budaya kolektif memiliki konsep diri interindependen. Perbedaan konsep diri membawa pengaruh pada banyak aspek perilaku seseorang. (Sholehah et al., 2018)	Instrumen penelitian ini diacu dari penelitian (Sholehah et al., 2018) yang terdiri dari 12 pernyataan dengan indikator: 1. Motivasi 2. Sikap 3. Keyakinan 4. Imbalan dan hukuman Instrumen diukur menggunakan skala linkert 5 poin, point 1: Sangat Tidak Setuju (STS), point 2: Tidak Setuju (TS), point 3: Netral (N), point 4: Setuju (S), point 5: Sangat Setuju (SS).
5.	Ketaatan Aturan Akuntansi (KAA)	Ketaatan aturan akuntansi merupakan suatu kewajiban dalam organisasi untuk mematuhi segala ketentuan atau aturan akuntansi dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan pembuatan laporan keuangan agar tercipta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan laporan keuangan yang dihasilkan efektif, handal serta akurat informasinya (Gustina, 2018)	Instrumen penelitian ini diacu dari penelitian (Shintadevi, 2015) yang terdiri dari 13 pernyataan dengan indikator: 1. Persyaratan pengungkapan 2. Relevan dan andal dalam penyajian laporan keuangan 3. Kehati-hatian dan konsistensi Instrumen diukur menggunakan skala linkert 5 poin, point 1: Sangat Tidak Setuju (STS), point 2: Tidak Setuju (TS), point 3: Netral (N), point 4: Setuju (S), point 5: Sangat Setuju (SS).

Sumber: beberapa artikel yang diolah, 2020.

D. Alat Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Metode statistik deskriptif dapat digunakan pada penelitian ini untuk memberikan gambaran atau analisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan akuntansi. Statistik deskriptif di dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran demografi populasi penelitian. Uji statistik deskriptif bertujuan untuk menggambarkan suatu data dalam variabel yang dilihat dari nilai mean (rata-rata), minimum, maksimum dan standar deviasi (Ghozali, 2018).

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dinyatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2018). Validitas dalam penelitian menyatakan derajat ketepatan alat ukur penelitian terhadap isi sebenarnya yang diukur. Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan *Confirmatory Factor Analysis* (CFA) yaitu analisis faktor yang digunakan dengan tujuan menguji atau mengonfirmasikan secara empiris model pengukuran (*measurement model*). Asumsi yang mendasari dapat tidaknya digunakan analisis faktor adalah data matrik harus memiliki korelasi yang cukup (*sufficient correlation*).

Uji *Barlett of Spheriicity* merupakan uji statistik untuk menentukan ada tidaknya korelasi antar variabel. Semakin besar sampel menyebabkan *Barlett test* semakin sensitif untuk mendeteksi adanya korelasi antar variabel. Alat uji lain yang digunakan untuk mengukur tingkat interkorelasi antar variabel dan dapat tidaknya dilakukan analisis faktor adalah *Kaiser Meyer Olkin Measure of Sampling Adequacy* (KMO MSA). Nilai KMO MSA bervariasi dari 0 sampai dengan 1. Nilai yang dikehendaki harus $> 0,50$ untuk dapat dilakukan analisis faktor (Ghozali, 2018).

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan metode pengukuran terhadap kuesioner yang menjadi indikator suatu variabel (Ghozali, 2018). Kuesioner dikatakan reliabel apabila memberikan jawaban yang konsisten. Pengujian dilakukan dengan menghitung *Cronbach Alpha* dari masing-masing instrumen dalam suatu variabel. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel atau andal jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,70 atau 70% (Ghozali, 2018).

E. Pengujian Hipotesis

1. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen (Ghozali, 2018). Persamaan dalam analisis regresi linear berganda dari penelitian ini sebagai berikut:

$$KA = \alpha + \beta_1 PI + \beta_2 MI + \beta_3 PC + \beta_4 KAA + e$$

Keterangan:

KA	= Kecurangan Akuntansi
a	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	= Koefisien Regresi
PI	= Pengendalian Internal
MI	= Moralitas Individu
PC	= <i>Personal Culture</i>
KAA	= Ketaatan Aturan Akuntansi
e	= Error term

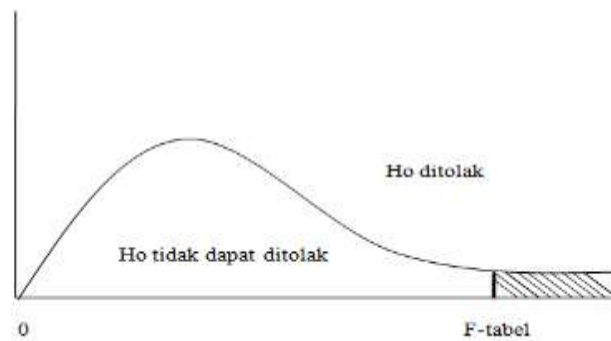
2. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam mengukur variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 – 1. Apabila nilainya mendekati nol berarti ketidakmampuan variabel independen menjelaskan variabel dependent. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2018).

3. Uji F (*goodness of fit test*)

Uji F digunakan untuk menguji kemampuan variabel independen dalam menguji variabel dependen, dengan kata lain menguji fit atau tidaknya suatu model yang digunakan. Uji F digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi dalam menaksir nilai aktual (Ghozali, 2018). Nilai F memiliki ketentuan sebagai berikut:

- 1) $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan $p\text{ value} < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Ini berarti bahwa model dalam penelitian ini bagus.
- 2) $F_{hitung} < F_{tabel}$ dan $p\text{ value} > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a tidak diterima. Ini berarti bahwa model dalam penelitian ini tidak bagus.

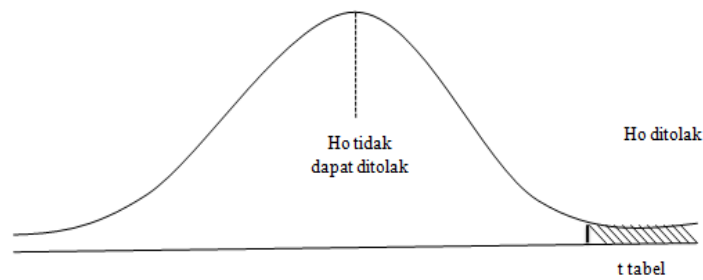


Gambar 3.1
Uji F

4. Uji Statistik t (t-test)

Uji T menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018). Tujuan pengujian untuk mengetahui koefisien regresi signifikan atau tidak. Uji t digunakan untuk mengukur signifikansi pengaruh pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan nilai t_{hitung} masing-masing koefisien regresi dengan t_{tabel} (nilai kritis) sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan. Ketentuan menilai hasil hipotesis uji t adalah menggunakan tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan $df = n-1$ (Ghozali, 2018). Dasar kriteria penerimaan hipotesis positif:

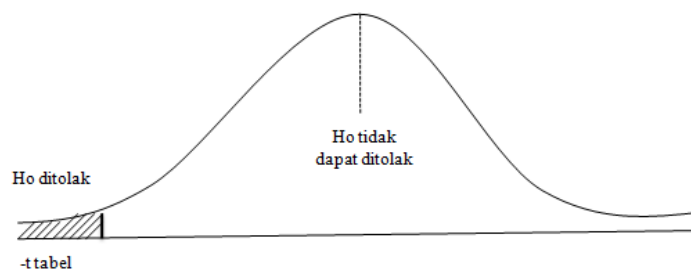
- 1) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $P\ value < \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Berarti variabel independen mempunyai pengaruh positif terhadap variabel dependen.
- 2) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $P\ value > \alpha = 0,05$, maka H_0 tidak ditolak dan H_a tidak diterima. Berarti variabel independen tidak mempunyai pengaruh positif terhadap variabel dependen.



Gambar 2.2
Uji t Kriteria Positif

Dasar kriteria penerimaan hipotesis negatif:

- 1) Jika $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ atau $P\ value < \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti variabel independen mempunyai pengaruh negatif terhadap variabel dependen.
- 2) Jika $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ atau $P\ value > \alpha = 0,05$, maka H_0 tidak ditolak dan H_a tidak diterima, berarti variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.



Gambar 3.3
Uji t Kriteria Negatif

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan menguji secara empiris pengaruh pengendalian internal, moralitas individu, *personal culture* dan ketaatan aturan akuntansi terhadap kecurangan akuntansi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden yang bekerja pada bagian keuangan / akuntansi di OPD Kabupaten Magelang. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil uji koefisien determinasi (*Adjusted R²*) menjelaskan variabel kecurangan akuntansi (KA) adalah sebesar 19%.
2. Hasil uji F menunjukkan variabel independen dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabel dependen secara baik yang berarti bahwa model penelitian ini layak atau *fit*.
3. Hasil uji t menunjukkan bahwa pengendalian internal, moralitas individu dan ketaatan aturan akuntansi tidak berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi. Sedangkan *personal culture* berpengaruh positif terhadap kecurangan akuntansi.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini hanya menguji pengaruh pengendalian internal, moralitas individu, *personal culture* dan ketaatan aturan akuntansi terhadap kecurangan akuntansi. Selain itu variabel independen dalam penelitian ini hanya menjelaskan 19% faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan

akuntansi. Hal ini berarti masih banyak variabel lain yang dapat mempengaruhi kecurangan akuntansi.

2. Penelitian ini hanya menggunakan sampel pegawai bagian keuangan yang bekerja di OPD Kabupaten Magelang. Masih terdapat objek penelitian lain di luar bagian keuangan di lingkungan OPD Kabupaten Magelang yang dapat diteliti.

C. Saran

1. Penelitian selanjutnya diharapkan bisa memperluas cakupan variabel penelitian sehingga diharapkan mampu untuk meningkatkan penjelasan variabel lain yang mempengaruhi kecurangan akuntansi seperti kesesuaian kompensasi dan asimetri informasi.
2. Untuk memperoleh informasi lebih detail mengenai kecurangan akuntansi, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian misalnya dengan sampel seluruh pegawai yang bekerja pada OPD di Kabupaten Magelang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2014). *Auditing & Jasa Assurance* (Edisi 15). Penerbit Erlangga.
- Arista, L. L. (2015). Pengaruh Faktor - Faktor internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada PT. Pegadaian Persero Surakarta. *Ekonomika-Bisnis*, 6(2). <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jeb>
- Artini, N. L. E. A., Adiputra, I. M. P., & Herawati, N. T. (2014). Pengaruh Budaya Etis Organisasi Dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Jembrana. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 2(1).
- Astuti, N. K. A. T., Sujana, E., & Purnamawa, I. G. A. P. (2017). Pengaruh Moralitas Individu, Ketaatan Aturan Akuntansi, Dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Akuntansi Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Kabupaten Buleleng. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 1(1).
- Azmi, N. (2017). *Pengaruh Ketaatan Aturan Akuntansi, Kesesuaian Kompensasi Dan Asimetri Informasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Pada BUMN di Kota Padang)*. 1–18.
- Bertens, H. (1993). *The postmodern Weltanschauung and its Relation to Modernism: An Introductory Survey*. SUNY Press.
- Budiantari, N. N. A., Yuniarta, G. A., & Wahyuni, M. A. (2017). Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Profesionalisme Badan Pengawas Dan Moralitas Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Akuntansi (Studi Empiris Pada LPD Se-Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2).
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gustina, I. (2018). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada SKPD Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 7(2), 1–10.
- Halim, A., & Abdullah, S. (2006). Hubungan Dan Masalah Keagenan Di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2(1), 53–64.
- Hartadi, B. (1992). *Sistem Pengendalian Intern dalam Hubungannya dengan Manajemen dan Audit* (2nd ed.). BPFE.
- <http://www.bpkp.go.id/>. (n.d.). *Opini BPK Atas LKPD*. Retrieved March 11, 2020, from <http://www.bpkp.go.id/diy/konten/1857/Mitra-Kerja.bpkp>.

- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (1999). *Metodologi Penelitian Bisnis* (Edisi 1). Fakultas Ekonomik dan Bisnis UGM.
- Indriastuti, D. E., Agusdin, & Animah. (2016). Analisis Pengaruh Asimetri Informasi, Pengendalian Internal, Persepsi Kesesuaian Kompensasi, Moralitas Individu Dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecenderngan Kecurangan Akuntansi. *Jurnal InFestasi*, 12(2), 115–130.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360. <https://doi.org/10.1057/9781137341280.0038>
- Keefer, P., & Khemani, S. (2004). Democracy , Public Expenditures and the Poor. *The World Bank*, 1–45.
- Kohlberg, L. (1995). *Tahap - Tahap Perkembangan Moral*. Kanisius.
- Kusumastuti, N. R., & Meiranto, W. (2012). *Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Dengan Perilaku Tidak Etis Sebagai Variabel Intervening*. 1, 1–15.
- Latifah, N. (2010). Adakah Perilaku Oportunistik Dalam Aplikasi Agency Theory Di Sektor Publik? *Fokus Ekonomi*, 5(2), 85–94.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset.
- Mariana, D. (2008). Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Perilaku Pejabat Publik: Studi Pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. *Sosiohumaniora*, 10(3), 1–19.
- Mashabi, S. (2020). *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2019 Naik Jadi 40*. Wwww.Kompas.Com.
<https://nasional.kompas.com/read/2020/01/23/16565951/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-pada-2019-naik-jadi-40>
- Mulyadi. (2002). *Auditing* (Edisi 6). Salemba Empat.
- Nasional.tempo.co. (2018). *Kasus Korupsi Tahun 2017, ICW: Kerugian Negara Rp6,5Triliun*. Wwww.Nasional.Tempo.Co.
<https://nasional.tempo.co/read/1062534/kasus-korupsi-tahun-2017-icw-kerugian-negara-rp-65-triliun>.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrua.
- Pratolo, S., Yaya, R., & Sofyani, H. (2016). *Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah (Konsep dan Implementasi Untuk Akademisi dan Praktisi)*. LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

- Rahmaidha, R. (2016). Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kecurangan Akuntansi. *Jurnal Profita Edisi 4, 1*, 1–14.
- Rahmawati, A. P. (2012). *Analisis Pengaruh Faktor Internal Dan Moralitas Manajemen Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi*. Universitas Diponegoro.
- Ramadhan, A. (2020). *Catatan ICW, Tren Penindakan Korupsi Turun Jadi 271 Kasus*. *Www.Kompas.Com*.
<https://nasional.kompas.com/read/2020/02/18/16532131/catatan-icw-tren-penindakan-korupsi-turun-jadi-271-kasus>
- Ramamoorti, S. (2008). The Psychology and Sociology of Fraud : Integrating the Behavioral Sciences Component Into Fraud and Forensic Accounting Curricula. *Issues In Accounting Education*, 23(4), 521–533.
- Shintadevi, P. F. (2015). Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi Dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Dengan Perilaku Tidak Etis Sebagai Variabel Intevening. *Jurnal Nominal, IV(2)*, 111–126.
- Sholehah, N. L. H., Rahim, S., & Muslim, M. (2018). Pengaruh Pengendalian Internal, Moralitas Individu dan Personal Culture Terhadap Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris Pada OPD Provinsi Gorontalo). *Jurnal Ilmiah Akuntansi, 1(1)*, 40–54.
- Simanjuntak, B. H. (2005). Menyongsong Era Baru Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 1–15.
- Susanto, E. (2020). *Jual 100-an Kendaraan Dinas, Oknum PNS Pemkab Magelang Dibui*. *Www.News.Detik.Com*. <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4943316/jual-100-an-kendaraan-dinas-oknum-pns-pemkab-magelang-dibui?single=1>.
- Tuanakotta, T. M. (2010). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif* (3rd ed.). Salemba Empat.
- Tunggal, A. W. (2009). *Akuntansi Manajemen*. Harvindo.
- Udayani, A. A. K. F., & Sari, M. M. R. (2017). Pengaruh Pengendalian Intenal Dan Moralitas Individu Pada Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 18.3*, 1774–1799.
- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Welton, R. E., J., R. D., & M., L. (1994). Promoting the Moral Development of Accounting Graduate Students: An Instructional Design and Assessment. *Accounting Education. International Journal, 3(1)*, 35–50.